

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet.1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005)
- Amrusi, Fahmi dalam Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, (Bandung: Nusamedia, 2012)
- Andi, Agussalim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007)
- Arikuntoro, Suharismi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002)
- Dellyana, Shanty, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988)
- Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Hanintjo, Ronny, Metodologi Penelitian dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Koesna, R.A, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: Sumur), 2005
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014)
- Nazir, Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Amirko, 1984)
- Shiddiq, Mhd, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, (Pradnya Paramita : Jakarta, 2003)
- Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah Cet.2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik Cet.3, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020)

Teguh, Harrys Pratama, Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia , Cetakan Pertama, ( Bandung: Pustaka Setia, 2020)

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

**Wawancara**

Ata Nuridha, Wawancara, Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Kelompok Jabatan Fungsional, (Semarang : 27 Juni 2023)

Catur Karyanti, Wawancara, Jejaring Perlindungan Perempuan dan Kelompok Jabatan Fungsional, (Semarang : 27 Juni 2023)

Ninik Jumoenita, Wawancara, Pendamping Korban UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, (Semarang, 27 Juni, 2023)

**Jurnal**

Dewi, Septiani Kumala, “Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam”, 2021.

Justitia, Airlangga, “Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No.1, April, 2018.

Lampiran Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Pahlevi, VR, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, *E-journal Universitas Atmajaya*, 2016

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo  
Kampus Universitas Diponegoro  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 76916201 Fax (024) 76916206  
Laman: [www.fh.undip.ac.id](http://www.fh.undip.ac.id) , Pos-el: [fh\[at\]ve.undip.ac.id](mailto:fh[at]ve.undip.ac.id)

Nomor : 280/UN7.FI/IAK/IV/2023  
Lamp. :  
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

02 APR 2023

Yth. Kepala DPPPA Kota Semarang  
Jl. Prof. Sudarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Geovanno Adrian Ramadhana  
NIM : 11000119140594  
alamat : Ketileng Indah 3/1, Kel.Sendangmulyo, Kec.Tembalang,  
Kota Semarang  
nomor HP : 085887898450  
bidang minat : Hukum Tata Negara  
judul skripsi : Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan Anak

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19711191993032002

Keterangan : Surat ijin penelitian di Kantor DP3A Kota Semarang



Keterangan : Wawancara Jejaring Perlindungan Perempuan dan Kelompok Jabatan Fungsional, Ibu Catur Karyanti